

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo)**



Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Disusun Oleh:

Lilis Wijayanti
B200 130 251

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN
INTERN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi empiris pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo)**

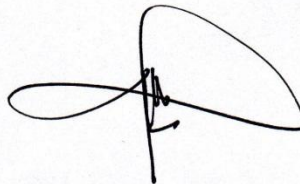
PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

LILIS WIJAYANTI
B200 130 251

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Drs. Atwal Arifin, M.Si., Akt., CA)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (Studi empiris pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo)**

Yang ditulis oleh:

LILIS WIJAYANTI

B 200 130 251

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal 21 Januari 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Drs. AtwalArifin, M.Si.,Akt., CA
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Zulfikar, S.E., M.Si.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Andy Dwi Bayu Bawono, S.E., M.Si., Ph.D
(Anggota II Dewan Penguji)


()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Haryono, SE., M.Si)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Januari 2017

Penulis



Lilis Wijayanti
B200130251

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi empiris pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo.

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode sampel jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner sebanyak 86 eksemplar yang dibagikan kepada seluruh responden pada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan SPSS 21.00.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, sistem pengendalian intern dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo.

Kata Kunci: Kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, teknologi informasi, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of human resource competency, internal control system and the utilization of information technology on the Quality of local Government Financial Report (LKPD) in DPPKAD of Sukoharjo regency.

The used sampling method is the saturated samples. Data collection is done by giving as many as 86 copies of the questionnaire, which was distributed to respondents on DPPKAD of Sukoharjo Regency. The data obtained are then analyzed using SPSS 21.00.

Based on the analysis result, obtained that the human resource competency has insignificant effect on the Quality of local Government Financial Report (LKPD) in DPPKAD of Sukoharjo regency, internal control system and the utilization of information technology has significant effect on the Quality of local Government Financial Report (LKPD) in DPPKAD of Sukoharjo regency.

Keywords: *Human resources, internal control system, information technology, quality of local government financial report.*

1. PENDAHULUAN

Dalam era reformasi ini, di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut Good Government Governance, termasuk di Indonesia. Menurut Sedarmayanti (2012:10), terselenggaranya Good Government Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Akuntabilitas dan

transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah.

Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Kegagalan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, dandidukung dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada terciptanya *good governance*.

Selain Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern juga memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Sistem Pengendalian Intern tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara. Untuk meyakinkan *stakeholders* maupun publik tentang keakuratan dan keandalan laporan keuangan yang dibuat pemerintah maka dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal.

Hal ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses dan mengelola informssi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Menurut Widjajanto (2001:89), secara umum manfaat yang

ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu penyiapan laporan pemanfaatan teknologi akan meningkatkan ketepatan waktu LKPD. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 86 orang pegawai. Sampel merupakan bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Sugiyono (2011:118), bahwa “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini didapat dengan teknik pengambilan sampel *Nonprobability Sampling* dengan *sampling* jenuh. Penulis menggunakan teknik *sampling* ini karena jumlah populasi sebanyak 86 orang pegawai. Menurut Arikunto (2006:134), “apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi”. Dalam penelitian ini, melihat jumlah populasi sebanyak 86 orang Pegawai Negeri Sipil, maka semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian.

2.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan. Variabel ini akan diukur dengan menggunakan 12 pertanyaan, Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. indikator variabel yaitu (1) Informasi, pada item pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. (2) Transaksi, pada item pertanyaan 7, 8, dan 9. (3) Perbandingan laporan keuangan, pada item pertanyaan 10 dan 11. (4) Pemahaman laporan keuangan, pada item pertanyaan 12.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah penyangga untuk dapat mencapai tujuan dari organisasi. Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan instrumen yang berdasarkan penelitian Gtz dan Usaid/Clean Urban (2001). Dalam instrumen ini pengukuran

menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Variabel ini akan diukur dengan menggunakan 10 pertanyaan dan 3 indikator, yaitu: (1) Kemampuan individu, pada item pertanyaan 1, 2, dan 8. (2) Organisasi dan kelembagaan, pada item pertanyaan 3, 4, 9, dan 10. (3) Sistem untuk pencapaian tujuan, pada item pertanyaan 5, 6, dan 7.

Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Variabel pengendalian intern diukur dengan instrumen yang disusun berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan indikator variabel yaitu: (1) Pengelolaan sistem informasi, pada item pertanyaan 1. (2) Penggunaan, pada item pertanyaan 2, dan 3. (3) Pencatatan transaksi, pada item pertanyaan 4, 5, dan 6. (4) Pengujian kembali, pada item pertanyaan 7. (5) Pemeriksaan sistem akuntansi, pada item pertanyaan 8. (6) Pemisahan tugas, pada item pertanyaan 9.

Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah. Variabel teknologi informasi diukur dengan instrumen yang digunakan dalam penelitian Jurnal dan Supomo (2002). Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Variabel ini akan diukur dengan menggunakan 8 pertanyaan, 3 indikator variabel yaitu: (1) Perangkat, pada item pertanyaan 1, 2, dan 3. (2) Pengelolaan dan penyimpanan data keuangan, pada item pertanyaan 4, 5, dan 6. (3) Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer, pada item pertanyaan 7, dan 8.

2.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2009). Model regresi berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai berikut :

$$KLKD = \alpha + \beta_1SDM + \beta_2SPI + \beta_3TI + e$$

Keterangan:

KLKD = Kualitas laporan keuangan daerah

α	= Konstanta
β_1	= Koefisien regresi sumber daya
β_2	= Koefisien regresi sistem pengendalian intern
β_3	= Koefisien regresi teknologi informasi
SDM	= Variabel sumber daya manusia
SPI	= Variabel sistem pengendalian intern
TI	= Variabel teknologi informasi
e	= Variabel pengganggu

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai sah atau tidaknya suatu kuesioner yang disebarkan. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi *Product Moment Pearson* dengan tingkat signifikasinya yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, teknologi informasi, dan kualitas laporan keuangan daerah adalah valid, karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

3.2 Uji Reliabilitas

Hasil analisis reliabilitas dapat dilihat pada program SPSS versi 21.00, menunjukkan bahwa semua variabel baik variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah reliabel karena mempunyai nilai alfa cronbach $> 0,6$, sehingga dapat dipergunakan untuk mengolah data selanjutnya.

3.3 Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk masing-masing variabel dengan menggunakan *one-sample Kolmogorov Smirnov Test*. Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan melihat nilai *Kolmogorov-Smirnov* terhadap data *unstandardized residual* adalah sebesar 0,847, dapat diketahui bahwa semua *p-value* untuk data ternyata lebih besar dari $\alpha=5\%$ ($p>0,05$), sehingga dapat dinyatakan bahwa keseluruhan data yang diperoleh memiliki sebaran yang normal.

3.4 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa $VIF < 10$ dan nilai toleransi $> 0,1$, sehingga tidak terjadi multikolinieritas.

3.5 Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian dilakukan uji Glejser yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil perhitungan uji heteroskedastisitas yang menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas, karena nilai $p > 0,05$ atau tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

3.6 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 1,199 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,002, dan nilai sig. sebesar 0,236 lebih besar dari 5%, sehingga H1 ditolak, artinya kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara statistik signifikan.

Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hipotesis kedua menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel Sistem Pengendalian Intern sebesar 3,415 lebih besar dari t tabel sebesar 2,002, dan nilai sig. sebesar 0,001 lebih kecil dari 5%, sehingga H₂ diterima, artinya Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara statistik signifikan.

Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Teknologi Informasiberpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel Teknologi Informasi sebesar 2,002 lebih besar dari t tabel sebesar 2,002, dan nilai sig.

sebesar 0,006 lebih kecil dari 5%, sehingga H3 diterima artinya Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara statistik signifikan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, sistem pengendalian intern dan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2 Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Penelitian ini menggunakan kuisioner dalam pengambilan jawaban dari responden, sehingga penulis tidak mengawasi secara langsung atas pengisian jawaban tersebut. Kemungkinan jawaban dari responden tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dikarenakan kondisi-kondisi tertentu masing-masing responden. (2) Faktor pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terbatas pada Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, sehingga cakupannya kurang luas untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia. (3) Obyek penelitian hanya terbatas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo, Sehingga hasil penelitian tidak dapat di generalisasikan

4.3 Saran

Atas dasar kesimpulan serta keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan rekomendasi sebagai berikut: (1) Bagi peneliti berikutnya diharapkan menggunakan metode survey dengan wawancara langsung dalam pengisian kuesioner, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. (2) Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah variabel independen dan menambah sampel penelitian untuk membuktikan kembali variabel dalam penelitian ini. (3) Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah obyek penelitian lain yang lebih luas untuk memperkuat hasil penelitian.

5. DAFTAR PUSTAKA

Andini, Dewi&Yusrawati. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi I Vol. 24 No. 1 Juni 2015.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.

Cahyo Pradono, Febrian dan Basukianto. 2015. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)Vol. 22, No. 2. ISSN: 1412-3126.

Dppkad.sukoharjokab.go.id

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam Concept Statement No.1 tentang Objectives of Financial Reporting.

Herawati, Tuti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). Vol XI, No. 1 – 2014. ISSN : 1693-4482.

Mahmudi. 2010. Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2, Yogyakarta : Penerbit Andi.

- Mardiasmo. 2006. "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance", Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No.1 Mei 2006.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi ketiga. BPFE, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wati, KadekDesiana, dkk. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2 No: 1 Tahun 2014.
- Widjajanto, Nugroho. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Erlangga. Jakarta.
- Winidyaningrum dan Rahmawati. 2010. "Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi empiris di Pemda Subosukawonosraten)". SNA XIII.